

**ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'* ATERHADAP PERATURAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2014 *Jo* PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
1636/PER/XII/2010 TENTANG KHITAN PEREMPUAN**

SKRIPSI

Oleh:

Halilah

NIM. C91215125



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halilah

NIM : C91215125

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis *Saad Al-Dhari'ah* Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 September 2019

Saya yang menyatakan



Halilah

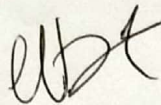
C91215125

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 *JO* PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1636/PER/XII/2010 TENTANG KHITAN PEREMPUAN" yang ditulis oleh Halilah, NIM. C91215125 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 September 2019

Pembimbing



Hj. Nabiela Naili, S.SI., M.HI

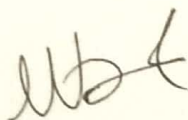
NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Halilah NIM. C91215125 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 15 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

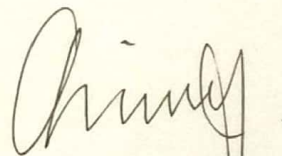
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



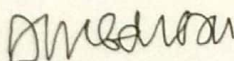
Hj. Nabiela Naili, S.SI., M.HI
NIP. 198102262005012003

Penguji II



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III



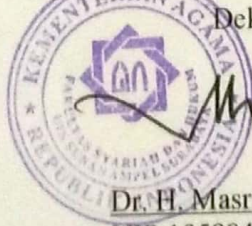
A. Mufti Khazin, M.HI
NIP. 197303132009011004

Penguji IV



Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 24 Oktober 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Halilah
NIM : C91215125
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : halilahlyla8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *SADD AL-DHARĀ'AH* TERHADAP PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 Jo PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 1636/PER/XII/2010 TENTANG KHITAN PEREMPUAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Oktober 2019

Penulis

(Halilah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*), berjudul “Analisis *Saad Al-Dhari’ah* Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa dasar pertimbangan pencabutan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pencabutan peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan? Dan bagaimana analisis *Saad Al-Dhari’ah* terhadap peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pencabutan peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan cara mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum mengenai *sadd ad-dhari'ah* dalam hukum islam untuk menganalisis dasar pertimbangan pencabutan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pencabutan peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Kebijakan Departemen Kesehatan terhadap praktik khitan perempuan telah mencabut peraturan sebelumnya karena banyaknya pihak yang tidak menginginkan praktik khitan perempuan dilakukan dan banyak yang beranggapan bahwa praktik khitan perempuan di Indonesia melakukan pelukaan genital perempuan. Kedua, Menteri Kesehatan tidak melarang total praktik khitan perempuan yang terdapat dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomer 6 tahun 2014 yang ada hanya himbaun untuk pedoman pelaksanaan khitan artinya, khitan itu diawasi dan diatur sedemikian rupa, agar tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan pada saat dikhitan. Pertimbangan Menteri kesehatan telah sesuai dengan *Saad Al-Dhari'ah* karena untuk mencegah kemafsadatan yang ditimbulkan apabila praktik khitan perempuan dilakukan. Akan tetapi peraturan tersebut dicegah tetapi tidak sepenuhnya ditutup karena masih ada peluang orang-orang melakukan khitan.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut maka disarankan kepada Menteri Kesehatan penting untuk memastikan sosialisasi Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tentang pencabutan Permenkes Nomor. 1636 tentang khitan Perempuan hingga Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota serta melibatkan Ikatan Bidan setempat. Kementerian Kesehatan penting mengembangkan SOP dan Petunjuk Pelaksana Larangan Medikalisasi khitan perempuan kepada masyarakat secara bertahap.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang Masalah.....	8
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>SAAD AL-DHARĪ‘AH</i> dan KHITAN PEREMPUAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian <i>Saad Al-Dhari‘ah</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Saad Al-Dhari‘ah</i>	24
C. Kedudukan <i>Saad Al-Dhari‘ah</i> sebagai sumber Hukum Islam	26
D. Unsur-Unsur <i>Saad Al-Dhari‘ah</i>	28
E. Khitan Perempuan dan Hukumnya	30
BAB III DASAR PERTIMBANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 <i>Jo</i> PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1636/PER/XII/2010 TENTANG KHITAN PEREMPUAN	
A. Landasan Terbitnya Fatwa MUI Nomor. 9A Tahun 2008 tentang Khitan Perempuan.....	47

Keterangan tentang ajaran khitan yang bersumber dari Nabi Ibrahim a.s disebutkan dalam ayat:

أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

Ikutilah agama Ibrahim yang hanif (Q.S. An-Nahl : 123).⁶

Dalam syariat Islam, khitan merupakan suatu ajaran yang di bawah oleh Nabi Muhammad saw. Sebagai kelanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim a.s. disebutkan dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اخْتَقَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ
الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا آتَتْ عَلَيْهِ نَمَانُونَ سَنَةً وَاحْتَقَنَ بِالْقَدْ وَ

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, Ibrahim kesayangan Allah berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun, dan beliau berkhitan dengan kapak (HR Bukhari Muslim)⁷.

Kata *al-qadum* adalah alat tukang kayu. Menurut Ibnu Hajar ‘Al-Asqalanī mengatakan, yang dimaksud dalam hadis diatas adalah alat yang digunakan untuk berkhitan/kapak.

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum khitan, sebagian ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya melakukan khitan bagi anak laki-laki dan perempuan. Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian dari ulama mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, ulama yang lain mengatakan sunnah bagi keduanya, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Malik. Pendapat banyak ahli fikih yang lain, bagi laki-laki sunnah dan bagi

⁶Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), 281.

⁷Diterjemahkan oleh Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia. 2007). 589.

الْحِثَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ (رواه أحمد)

Khitan itu disunnahkan bagi kaum laki-laki dan dimuliakan bagi kaum wanita (HR. Ahmad).⁹

Maksud dari hadits tersebut adalah bahwa khitan bagi kaum laki-laki adalah fitah atau sebuah kewajiban. Sedangkan dimuliakan bagi kaum wanita yang berarti tidak wajib bahkan tidak sampai pada sunnah. Makna kemuliaan dalam hal khitan perempuan secara sederhana dapat dipahami sebagai dukungan para ulama terhadap khitan perempuan.

Pendapat yang pro dengan khitan anak perempuan sepakat mengatakan bahwa khitan anak perempuan itu diperbolehkan dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Mereka berbeda pendapat hanya dalam menentukan hukumnya wajib, sunnah, atau makruh. Sedangkan pendapat yang kontra sepakat mengatakan, bahwa khitan anak perempuan hanya tradisi bukan dari ajaran Islam dan tidak mendatangkan mudharat serta melanggar HAM anak perempuan.¹⁰

⁸Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 404.

⁹Hasan M Ali, *Masail Fiqhiyah Al- Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 181.

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), 65.

Dalam istilah medis, khitan wanita juga dikenal dengan istilah *Female Genital Mutilation* (FGM). Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi FGM meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total sebagian dari organ genitalia eksternal atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan non medis. Oleh Karena itu, mereka menganggap prosedur FGM tidak bermanfaat bagi perempuan.¹²

Sampai saat ini menjadi sebuah perdebatan dan pertanyaan ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Banyaknya kontroversi terhadap khitan perempuan, menyebabkan adanya perbedaan pendapat tentang praktik tersebut, sehingga menimbulkan pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat. Khitan perempuan di Indonesia pernah dilarang oleh pemerintah melalui surat edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a, tanggal 20 april 2006 tentang larangan medikalisasi khitan perempuan bagi petugas kesehatan yang menyatakan tenaga medis tidak boleh membantu praktik tersebut sebagai upaya

¹² Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita...*, 388.

¹³ Ashabul Fadhli, “*Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan*” (Jurnal—UPI YPTK Padang, 2015), 47.

[illegible]

izin praktik atau surat izin kerja. Sehubungan dengan itu pihak yang boleh melakukan khitan pada perempuan adalah tenaga kesehatan perempuan.¹⁵

Ternyata, yang menarik setelah empat tahun berlalu, dikeluarkan lagi peraturan terbaru yang mencabut kebolehan tersebut yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa praktik khitan perempuan adalah praktik kultur atau tradisi bukan praktik medis karena tidak ada manfaatnya secara medis dan menyatakan bahwa diberikan mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan khitan perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*). Perbedaan peraturan yang baru dengan sebelumnya adalah dimana peraturan sebelumnya sama sekali tidak menegaskan adanya pelarangan atas pelukaan genital perempuan, malah menjadi petunjuk pelaksanaan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan pelukaan genital perempuan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014 tersebut dianggap suatu penengah atas pro dan kontra mengenai praktik khitan perempuan sejak dulu dan isu tersebut semakin memanas sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No.1636 tahun 2010 yang dianggap sebagai suatu praktik medikalisasi khitan perempuan.¹⁶

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang *Khitan Perempuan*

¹⁶*Siti Nurwati Khodijah Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas*
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2019/Hasil%20Kajian%20Kualitatif%20Pemotongan-Pelukaan%20Genitalia%20Perempuan%20di%2010%20Propinsi-%2017%20Kabupaten-Kota.pdf. 75 diakses pada tanggal 28 Juni 2019

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat di identifikasikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- [illegible]

Dari identifikasi permasalahan diatas peneliti hanya menfokuskan pada permasalahan tentang *Saad Al-Dhari'ah* terhadap khitan perempuan dengan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

Dari latar belakang masalah diatas maka masalah-masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan?
2. Bagaimana analisis *Saad Al-Dhari'ah* terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan?

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Analisis *Saad Al-*

- ¹⁷Taufiq Hidayatullah "*Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2010).

- c. Skripsi dari IAIN Surakarta yang berjudul “Praktek Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Jengglong Waru Kebakkramak Karanganyar” yang disusun oleh Setyaningrum tahun 2017 tentang pandangan hukum Islam serta praktek khitan perempuan di dusun jengglong waru kebakkramak karanganyar. Dalam penelitian ini dipaparkan mengenai khitan perempuan dalam hukum Islam di dusun jengglong waru dan lebih menfokuskan tata cara pelaksanaan praktek khitan perempuan serta pendapat para tokoh agama tentang praktek khitan perempuan di desa jengglong waru. Persamaan penelitian ini dengan yang sekarang yaitu membahas tentang pandangan hukum Islam mengenai khitan perempuan akan tetapi yang berbeda dari penelitian ini dengan yang sekarang yaitu penelitian sekarang lebih

[illegible]

- Dari beberapa penelitian yang ditulis belum ada yang membahas tentang analisis *Saad Al-Dhari'ah* terhadap peraturan menteri kesehatan Nomor 6 tahun 2014 Jo peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan. Untuk itu penulis perlu mengkaji tentang peraturan ini terutama jika ditinjau dari alasan-alasannya menggunakan hukum Islam khususnya *Saad Al-Dhari'ah*.

²⁰ Deni Riswanto Nugroho Haris “*Khitan Perempuan Menurut Pandangan Hukum Islam*” (Skripsi – IAIN Surakarta, 2006).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini banyak kegunaan dan manfaat, baik itu secara teoritis maupun secara praktis bagi para pembacanya. Adapun kegunaan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, memperluas wawasan, memperluas ilmu pengetahuan dalam artian membangun, mengetahui Hukum Islam khususnya *Saad Al-Dhari'ah* Tentang Khitan perempuan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2014 dan sebagai rujukan atau referensi bagi para peneliti maupun mahasiswa mengenai hukum Islam khususnya *Saad*

2. Manfaat praktis, hasil penelitian supaya bisa menjadi acuan pada masyarakat dan pihak-pihak yang relevan termasuk pemerintah dan juga tenaga kesehatan tentang bagaimana sebenarnya peraturan menteri kesehatan Nomor 6 tahun 2014 tentang pencabutan peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan menggunakan hukum Islam khususnya *Saad Al-Dhari'ah*. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi Menteri Kesehatan untuk memutus peraturan yang serupa.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan menghindari agar tidak terjadi salah penafsiran pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka peneliti melihat perlu mengemukakan pengertian masing-masing variabel secara tegas dan spesifik dalam judul “Analisis *Saad Al-Dhari’ah* terhadap Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan” sebagai berikut:

1. *Saad Al-Dhari'ah* adalah menghambat atau menghalangi jalan yang menuju kepada kerusakan dan untuk mencapai kemaslahatan mengenai Khitan perempuan, serta diperjelas lagi dengan Al-Quran buku-buku Fiqih wanita mengenai sunat perempuan.

- yaitu ritual peng
- rapa atas seluruh geni

elitian
elitian hukum merupakan suatu kegiatan ilm
de sistematika dan pemikiran tertentu va

m merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada teori, konsep, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengetahui suatu kebenaran atau hukum yang berlaku secara umum.

²¹SoerJono Sockamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Uneversitas Indonesia, 1996), 43.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, media online lainnya.²³ Dalam penelitian pustaka ini bersumber pada suatu penetapan tertulis oleh Departemen Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.

Data penelitian yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan Menteri Kesehatan:

- a. Data tentang peraturan Menteri Kesehatan
- b. Data tentang dasar pertimbangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang peraturan Nomor 06 tahun 2014 tentang pencabutan khitan perempuan.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), 236.

mendapatkan bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.

6. Teknik analisis data

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis dengan memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dan pada akhirnya disimpulkan, sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret.²⁷ Pola pikir dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif dan induktif yaitu mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum mengenai khitan perempuan dan mengemukakan pandangan Islam tentang khitan Perempuan dengan tujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai Analisis *Saad Al-Dhari'ah* terhadap Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang pencabutan menteri kesehatan Tahun 2010 tentang Khitan Perempuan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti membuat sistematika pembahasan yang akan disusun dalam penelitian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), 31.

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, Berisi gambaran sekilas tentang hukum Islam terhadap Khitan Perempuan sebagai pengantar. Bab ini membahas tentang pengertian *Saad Al-Dhari'ah*, macam-macam *Saad Al-Dhari'ah*.

Bab III, membahas tentang dasar pertimbangan pencabutan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan, dan putusan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 serta Nomor 6 Tahun 2014, kemudian membahas tentang alasan-alasan peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 dihapus.

Bab IV, membahas mengenai Analisis *Saad Al-Dhari'ah* terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan

Bab V, adalah penutup berisi kesimpulan penelitian dari permasalahan diatas serta kritik dan saran yang sifatnya membangun.

23

Tujuan penetapan hukum secara *Saad Al-Dhari'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauh kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas para mukallaf yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.²

Dalam kajian usul fikih, *Saad Al-Dhari'ah* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Saad al-dhari‘ah*

Sadduz Dhara'ī menurut bahasa artinya *saddu*: menutup dan *dzara'ī* kata jama' dari *dzari'ah* jalan artinya “menutup jalan”, sedangkan menurut istilah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, dengan kesimpulan *sadd ad-dzari'ah* ialah menghindarkan sesuatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara', tetapi sebenarnya perbuatan itu dapat mendatangkan kerusakan. Jika ia menimbulkan kerusakan, pencegahan terhadap kerusakan dilakukan karena ia bersifat terlarang.

b. *Fath adz-dhari*'*ah*

Fath ad-dhari'ah adalah kebalikan dari *Saad Al-Dhari'ah* yaitu jalan yang menyampaikan sesuatu yang dapat menimbulkan *al-maslahah* (manfaat kebaikan). Penggunaan media yang menghasilkan

¹ Ibid., 237.

²Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam* (Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014), 133.

kemashlahatan harus di dorong karena menghasilkan kemashlahatan adalah sesuatu yang diperintahkan dalam Islam.³

B. Dasar Hukum *Saad Al-Dhari'ah*

Dasar hukum dari *Saad Al-Dhari'ah* adalah alquran dan hadits yaitu:

a. Firman Allah Swt

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Dan janganlah kamu menghina sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan menghina Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan (QS.Al-An'am ayat 108).⁴

Menghina berhala tidak dilarang Allah Swt, tetapi ayat ini melarang kaum muslim mencaci dan menghina berhala karena larangan ini dapat menutup pintu kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan menghina Allah secara melampaui batas.

Dalam firman Allah Swt yang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakana (kepada Muhammad): “Ra’ina”, tetapi katakanlah “Unẓurna”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.⁵ (QS. Al Baqarah (2): 104).

Kata *ra'ina* artinya sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.

Ketika para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang yahudi juga memakai kata ini dengan digumamkan seakan-akan menyebut *ra'ina*, padahal yang mereka katakana adalah *ru'unah* yang

³ Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 236.

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 141.

⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*..., 16.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
مِنْ أَكْبَرِ لُكْبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ
يَسُبُّ الرَّجُلُ آيَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Nasrun Haroen mengutip dalam bukunya menerangkan hadits ini menurut Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa *Saad Al-Dhari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syarak, karena sabda Rasulullah diatas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan itu Rasulullah saw melarangnya dengan alasan lazimnya seseorang akan membalas dengan hal yang sebanding. Dalam kasus lain Rasulullah saw. Melarang memberi pembagian harta warisan kepada anak yang membunuh ayahnya (H.R. al bukhari dan Muslim). Untuk menghambat terjadinya pembunuhan orang tua oleh anak-anak yang ingin segera mendapatkan warisan.⁷

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 168.

ما أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.

دَرْ أُمِّ الْقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
menolak keburukan (Mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih
kebaikan (Maslahah)⁸

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang biasa mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *Saad Al-Dhari'ah* pun juga disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *Saad Al-Dhari'ah* terdapat *mafsadah-mafsadah* yang harus dihindari.

C. Kedudukan *Saad Al-Dhari'ah* sebagai sumber hukum Islam

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang *Saad Al-Dhari'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syarak. Ulama Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menggunakannya sebagai dalil akan tetapi waktu tertentu menolaknya sebagai dalil. Sedangkan menurut Maliki dan Hanafi

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

Umumnya jumhur ulama berpendapat bahwa *Saad Al-Dhari'ah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Ulama dari kalangan Maliki, Hanabilah, menyatakan bahwa *Saad Al-Dhari'ah* dapat di terima sebagian salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Demikian juga dengan ulama dari kalangan Hanafi, Syafi'i bahwa *Saad Al-Dhari'ah* dapat dijadikan dalil hukum dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolak untuk kasus-kasus lainnya.¹⁰

Rahmat Syafi'i mengutip dalam bukunya menerangkan bahwa Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjadikan ukuran niat dan tujuan dalam sebuah transaksi. Dalam masalah ini apabila perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tujuan aslinya kemudian tidak menunjukkan indikasi yang menunjukkan kesesuaian antara niat dan tujuan, maka akadnya dianggap sah tetapi ada perhitungan dengan Allah dan pelaku. Apabila niatnya bertentangan dengan syarak, maka perbuatannya adalah *fāsid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.¹¹

¹⁰ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: PT Karisma Putra Utama, 2017), 23.

¹¹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 138.

[illegible]

[digilib.uinsby.ac.id](#)

[illegible][illegible]

- [illegible]

[digilib.uinsby.ac.id](#)

[digilib.uinsby.ac.id](#)

dan dapat menjadikan permusuhan. Dimana hal ini sama sekali tidak diperkirakan oleh orang muslim bahwa ini hal ini akan terjadi.

3. *Al-Ifdha'* (penghubung)

Al-Ifdha' dapat dimaknai sebagai dugaan kuat akan terjadinya sesuatu (yang terlarang). *Al-Ifdha'* adalah penghubung di antara dua unsur *al-dhārī'ah* yaitu *al-wasilah* dan *al-muṭawwāsah ilayh*. *Al-Ifdha'* dibagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk perbuatan (*Fi'il*) dan pengandaian (takdir). Dalam bentuk perbuatan adalah terwujudnya *al-muṭawwāsah ilayy* setelah yang didahului adanya *al-wasilah*.

Satu hal yang perlu ditekankan bahwa kekuatan *Al-Ifdha'* bergantung pada dua hal yaitu adanya faktor kesengajaan pelaku *al-wasilah* untuk sampai pada tujuan, juga terdapat pada potensi dengan banyaknya pelanggaran *syariah* yang terjadi pada masa sebelumnya.¹²

E. Objek *Saad Al-Dhari'ah*

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada dua macam:

1. Perbuatan itu pasti berakibat pada perbuatan yang terlarang.
2. Perbuatan itu mungkin mengakibatkan perbuatan yang terlarang.

Perbuatan yang pertama jelas dilarang untuk mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu dilarang. Sedangkan yang kedua tersebut lebih

¹² Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa...* 32-34.

kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:¹³

1. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
2. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
3. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

F. Khitan Perempuan dan Hukumnya

1. Pengertian khitan

Istilah khitan merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat dengan proses pemotongan sebagian organ kelamin laki-laki dan perempuan. Secara bahasa, khitan berarti memotong, sedangkan dalam pengertian syariat, khitan adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar dan memotong sedikit daging yang ada dibagian atas *farji* (klitoris) sedangkan secara istilah merupakan suatu pemotongan pada bagian tertentu atas kelamin laki-laki maupun perempuan.¹⁴ Bagi perempuan adalah *khifaḍ* namun, ada pula yang berpendapat bahwa istilah khitan berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Makna asli kata khitan dalam bahasa Arab adalah bagian kemaluan laki-laki dan perempuan yang dipotong. Khitan perempuan adalah tindakan menggores

¹³ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, cet-1 (Surabaya: Diantama, 2008), 118.

¹⁴ Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadits Dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Teras, 2009), 43.

kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukainya. Dijelaskan secara rinci bagaimana melakukan khitan perempuan secara benar sesuai aturan kesehatan dan siapa saja yang berhak melakukannya.¹⁵

Ikutilah Agama Ibrahim yang hanif (Q.S. An-Nahl (16): 123).¹⁷

Dari berbagai perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa khitan adalah memotong kulit yang menutupi *zakar* (kemaluan laki-laki) sampai terbuka kepalanya dan memotong sedikit puncak daging yang terletak disebalah atas lubang *faraj* (kemaluan perempuan) yang menyerupai rongga ayam jago.¹⁸

2. Sejarah khitan perempuan

Khitan perempuan pertama kali dilakukan dimesir sebagai bagian dari upacara adat yang diperuntukkan khusus bagi perempuan yang sudah beranjak dewasa. Tradisi ini merupakan akulturasi budaya antara penduduk mesir dan orang-orang romawi yang saat itu tinggal di mesir. Data-data historis mengungkapkan khitan perempuan telah diperkenalkan dalam kitab suci taurat yang dibawa oleh Nabi Musa a.s. untuk diimani dan ditaati oleh orang-orang yahudi dan bangsa Israel.¹⁹

Tradisi khitan perempuan telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s yang diyakini sebagai petunjuk yang datang dari tuhan. Khitan dalam kitab Taurat dijadikan sebagai tanda yang membedakan antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain.²⁰ Hingga kini khitan perempuan dalam realitanya masih banyak dilakukan dinegara-negara Islam atau wilayah yang berpendudukan mayoritas muslim dan masyarakat muslim seperti di

¹⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 281.

¹⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 588.

¹⁹ Mahmuddin Bunyamin, *Fiqh Keschata Permasalahan Aktual dan Kontemporer* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), 113.

²⁰Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015), 149-150

Afrika, Mesir, Mali, Sudan, sementara di Asia praktik ini umumnya dilakukan dilingkungan masyarakat muslim seperti Pakistan, Fillipina, Malaysia, Brunei dan Indonesia.²¹

Khitan merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim a.s, yang turun temurun dianut oleh umat-umat setelahnya sampai dikuatkan kembali dalam ajaran yang harus dianut oleh Islam. Keterangan tentang ajaran khitan yang bersumber dari Nabi Ibrahim a.s, yang dikemukakan dalam riwayat berikut:

رُوي أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتَنَ بِالْقُدُومِ

Dan diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim a.s. dikhitan dengan (menggunakan) kapak.²²

Khitan atau sunat merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. Tradisi ini sudah dikenal dengan penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh suku-suku benua Afrika. Tradisi khitan sudah berlaku di kalangan bangsa Mesir kuno. Tujuannya sebagai langkah untuk memelihara kesehatan dari penyakit yang dapat menyerang kelamin. Karena lapisan kulit (kulup) yang berisi kotoran bisa dihilangkan kotorannya dengan cara dikhitan.²³

Terdapat dua pemahaman umum tentang sejarah khitan, yang pertama khitan bukan perbuatan baru, artinya praktik khitan ini dilakukan oleh masyarakat sebelum Islam datang sebagai sebuah agama yang dibawa Rasulullah Muhammad saw. Kedua, khitan tidak hanya dikenal

²¹ Mahmuddin Bunyamin, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer...*, 114.

²²Diterjemahkan oleh Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2...*, 589.

²³ Ahmad Shalabi, *Kehidupan Sosial dan Pemikiran Islam*, (Jakarta: Amzah, 2001), 68.

dalam agama Islam saja, namun juga dikalangan agama Yahudi dan Nasrani.

3. Hukum khitan perempuan

Syekh Muhammad Husain menyebutkan bahwa dikalangan Fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan status hukum khitan bagi setiap laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini apakah itu wajib atau sunah, mazhab Syafi'i mengatakan wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan adapun yang dikatakan mazhab Hanabilah mengatakan wajib hukumnya bagi laki-laki serta bukan wajib tetapi sunah dan kebagusan bagi perempuan.²⁴

Adapun khitan bagi perempuan yang ditetapkan oleh mazhab Hanafi, Maliki dan Hanabilah yaitu khitan dengan berdasarkan hadits:

أَنَّ امْرَأَةً تَخْتَبِئُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ.
(رواه أ. بوداود عن أم عطية)

Bahwasanya seorang perempuan mengkhitankan dimadinah maka nabi saw, berkata kepadanya, jangan engkau merusak (kelaminnya), karna hal itu merupakan kehormatan bagi perempuan. (H.R. Abu Dhawud yang bersumber dari Ummi Athiyyah).²⁵

Maksud perkataan Nabi, “*janganlah kamu merusak alat kelamin perempuan itu*”, bukanlah larangan mengkhitannya, melainkan perintah untuk berhati-hati melaksanakan khitan tersebut. Selain itu, pada hadist tersebut tidak terdapat unsur kewajiban, kecuali hanya unsur legalitas

²⁴ Mahmuddin Bunyamin, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer...*, 118

²⁵ Abu Daud, Al-Sunan, Juz IV, kitab Al-Adab, nomor hadis 5271, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t, 368. Diterjemahkan oleh Bunyamin Agus Hermanto, *Fiqh Keshatan...*, 119.

Lebih lanjut, ditegaskan oleh mahjudin dalam bukunya *masa'il al-fikih*, khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, berdasarkan beberapa keterangan tersebut, disertai dengan alasan bahwa khitan merupakan suatu wahana dalam melakukan thaharah bagi najis (hadas) yang status hukumnya wajib, sedangkan khitan perempuan berdasarkan hal tersebut sunah disertai dengan alasan bahwa tidak ada alat kelamin perempuan yang perlu dibuang untuk kepentingan thaharah. Sebagaimana halnya kelamin laki-laki yang harus dibuang sebagian kulitnya ketika dikhitan. Disunahkan bagi perempuan agar khitan hanya sebagai ikatan terhadap ajaran Nabi Ibrahim a.s, apabila disanggupinya.²⁷

Husein Muhammad menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai khitan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya intervensi tradisi budaya yang memengaruhi kebijakan pengambilan hukum (ijtihad) para ulama dalam menerima dan memahami teks-teks agama, yang dalam hal ini hadits-hadits Nabi saw, sebab tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab, dan masyarakat lain sebelum Islam datang.²⁸

²⁷ Mahjuddin, *Masa'il Al-Fiqh Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 27-28.

[illegible]

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa kalangan ulama, namun yang pastinya khitan bagi perempuan merupakan sebuah syariat terlepas hukumnya wajib ataupun sunah dan tidak ada perintah yang tegas dalam al quran untuk melakukan khitan, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula tidak ada perintah agama agar organ vital perempuan khususnya klitoris dipotong, dilukai, atau dihilangkan.³⁰

Dalam istilah medis, definisi FGM (*female genital mutilation*) meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian

³⁰ Ibid..., 122

- 1) *Klitoridektomi*, yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris, termasuk pengangkatan hanya pada preputium klitoris (lipatan kulit di sekitar klitoris).
- 2) *Eksisi*, yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora, dengan atau tanpa eksisi dari labia majora (labia adalah “bibir” yang mengelilingi vagina).
- 3) *Infibulasi*, yaitu penyempitan lubang vagina dengan membentuk pembungkus. Pembungkus dibentuk dengan memotong dan reposisi labia mayor atau labia minor, baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.
- 4) Tipe lainnya, yaitu semua prosedur berbahaya lainnya ke alat kelamin perempuan untuk tujuan nonmedis, misalnya menusuk, melubangi, menggores, dan memotong daerah genital.³¹

- 2) *Eksisi*, yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris minora, dengan atau tanpa eksisi dari labia majora (labia “bibir” yang mengelilingi vagina).
- 3) *Infibulasi*, yaitu penyempitan lubang vagina dengan membumkus. Pembungkus dibentuk dengan memotong dan menyatukan labia mayor atau labia minor, baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.
- 4) Tipe lainnya, yaitu semua prosedur berbahaya lainnya ke alat kelamin perempuan untuk tujuan nonmedis, misalnya menusuk, menggosok, menggores, dan memotong daerah genital.³¹

- 2) *Eksisi*, yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris minora, dengan atau tanpa eksisi dari labia majora (labia “bibir” yang mengelilingi vagina).
- 3) *Infibulasi*, yaitu penyempitan lubang vagina dengan membumkus. Pembungkus dibentuk dengan memotong dan menyatukan labia mayor atau labia minor, baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.
- 4) Tipe lainnya, yaitu semua prosedur berbahaya lainnya ke alat kelamin perempuan untuk tujuan nonmedis, misalnya menusuk, menggosok, menggores, dan memotong daerah genital.³¹

4. Beberapa deskripsi jenis-jenis mengkhitan perempuan

Dikalangan Masyarakat pelaksanaan khitan perempuan atau yang dikenal dengan istilah “*Khifad*’ dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara tradisional dan secara medis. Namun, pada umumnya masyarakat lebih suka mengkhitan anak perempuan mereka secara tradisional, hal ini disebabkan sedikitnya rumah-rumah bersalin yang melayani khitan untuk perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang khitan perempuan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Secara tradisional

Menurut salah seorang tukang khitan perempuan mengatakan bahwa ia melakukan praktik khitan perempuan karena faktor keturunan. Dalam menjalankan praktiknya, selain menyiapkan sebilah pisau kecil, ia juga menyiapkan sebuah panic berisi air dengan diberi

[illegible]

b. Secara medis

c. Menurut Nabiela Nailly tentang praktik khitan perempuan dari beberapa penelitian salah satunya penelitian di banyuwangi tampak bahwa ada beberapa praktik khitan perempuan di Indonesia sebenarnya tidak berbahaya diantaranya adalah menggosokkan darah ayam jago ke alat kelamin perempuan atau anak perempuan, bahkan

³⁴ Ibid., 68

perempuan mengandung hikmah antara lain memberikan kepuasan dalam hubungan seks, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri.

5. Tujuan dan alasan khitan perempuan

a. Tujuan khitan perempuan dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁶

- 1) Untuk menjaga kelangsungan identitas budaya. Ada anggapan di masyarakat dengan menjalankan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi yang penting bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan dan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok masyarakat.
- 2) Menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan. Masyarakat meyakini bahwa khitan membuat gairah perempuan dapat dikontrol. Perempuan dilarang memiliki hasrat seksual yang menggebu-gebu karena akan membahayakan masyarakat, jika perempuan tidak bisa menahan rangsangan seksualnya ia akan terjerumus kedalam praktik seksualitas diluar nikah. Bahkan lebih jauh lebih dari itu, perempuan yang tidak di khitan akan sangat diragukan kesetiannya terhadap pasangan atau suami

Dengan kata lain, tujuan khitan perempuan lebih karna alasan psikoseksual yaitu mengurangi atau menghilangkan bagian yang sensitive pada bagian vagiana terutama klitoris. Lebih jelasnya yaitu membelenggu keinginan seksual perempuan,

³⁶ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015), 160.

menjaga dan memelihara kemurnia dan keperawanan sebelum menikah. Khitan juga diyakini sebagai upaya meningkatkan kesuburan perempuan dan menjamin lancarnya persalinan.

3) Menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan tubuh perempuan.

Khitannya perempuan biasanya dikaitkan dengan tindakan penyucian diri baginya. Selain itu masyarakat percaya perempuan akan menjadi lebih subur dan mudah melahirkan. Alasan kebersihan dan keindahan menjadi jelas karena anggapan masyarakat bahwa bagian tubuh perempuan terutama bagian klitoris yang menonjol keluar dianggap kotor dan tidak enak dipandang sehingga harus dibuang untuk kebersihan agar tampak lebih menarik.

4) Alasan keagamaan. Umumnya masyarakat islam yang melakukan

khitan perempuan menyebut alasan keagamaan mereka meyakini bahwa khitan perempuan menyebut alasan keagamaan. Mereka meyakini bahwa khitan merupakan kewajiban dalam Islam. Secara historis khitan bukan dibenarkan oleh Islam karena sudah di praktikkan jauh sebelum datangnya Islam.

Masyarakat menganggap khitan bagi laki-laki dan perempuan merupakan symbol ke Islaman. Khitan dianggap sebagai proses mengislamkan. Jika tidak dikhitan, tidak diperkenankan membaca Alquran dan melakukan sholat lima waktu.

d. Batasan usia khitan perempuan dalam prespektif Islam

Pelaksanaan khitan untuk laki-laki terkait dengan kewajiban melaksanakan shalat setelah dewasa. Ketika seseorang ingin mengerjakan shalat terlebih dahulu harus suci fisiknya dari najis dan hadats, untuk itu maka kulit yang menutupi penis harus dipotong, jika tidak maka najis setelah seseorang buang air kecil tertinggal di dalamnya. Hal ini menyebabkan shalatnya tidak sah. Maka dari itu wajib dihilangkan dengan cara dikhitan. Sedangkan perempuan dilakukan sewaktu bayi atau kecil, sehingga yang bersangkutan tidak mengetahuinya.³⁸

Ulama fikih mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa waktu seorang anak wajib di khitan adalah setelah dewasa, sebab khitan dilakukan untuk kepentingan kesucian. Menurut ulama fikih

³⁸ Eiko An-Nawawiyah, *Analisis Hukum Khitan laki-laki dan Perempuan*, https://www.academia.edu/19918074/ANALISIS_HUKUM_KHITAN_Laki-laki_dan_Pemempuan. Diakses pada tanggal 02- November 2019, jam 12:14.

mazhab syafi'i waktu khitan di sunahkan ada dua pendapat yaitu pendapat shahih yang di fatwakan adalah pada saat umur 7 hari sejak kelahiran anak. Hal ini berdasarkan hadits yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang mengatakan:

خَتَنَ إِبرَاهِيمَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ وَخَتَنَ إِسْمَاعِيلَ لِثَلَاثِ عَشْرَ سَنَةً

Nabi Ibrahim mengkhitan anaknya yang bernama Ishaq ketika berumur 7 hari, dan mengkhitan Ismail ketika berumur 13 tahun.³⁹

Menurut ulama fikih mazhab Maliki dan Hanbali, waktu khitan dilakukan ketika anak berumur 7 tahun hingga 10 tahun. Sebab, waktu itulah anak diperintahkan mengerjakan shalat. Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa khitan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik anak, sudah mungkin apa belum khitan dilakukan. sebab tidak ada penegasan dari hadits dan Alquran kapan waktu dan usia khitan itu harus dilakukan.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan usia dalam melaksanakan khitan adalah:

- Waktu wajib yaitu sebelum masuk umur baligh
- Waktu yang dianjurkan yaitu ketika anak-anak dianjurkan untuk shalat (7 Tahun)

³⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadu Al-Ma'ad fi Hadi Khayr Al-Ibad Muhammad Khatam Al-Nabiiyin wa Al-Imam Al-Marsalin*, Juz ke-1,2, (Kairo: Matba'at Al-Mushriyyah), 40. Diterjemahkan oleh Hermanto Agus, *Fiqh Keschatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 115.

⁴⁰ Eiko An-Nawawiyah, Analisis Hukum Khitan laki-laki dan Perempuan, https://www.academia.edu/19918074/ANALISIS_HUKUM_KHITAN_Laki-laki_dan_Perempuan. Diakses pada tanggal 02- November 2019, jam 12:14.

Sepintas terlihat bahwa isu tentang khitan perempuan adalah tentang urusan agama, tetapi jika dilihat seksama akan terkuak sejumlah kepentingan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ajaran agama. Ada beberapa dari para orang tua melakukan khitan terhadap anak perempuan atau mengapa para perempuan yang sudah berumur tetap memaksakan diri untuk dikhitan, sebab, mereka meyakini khitan adalah kewajiban seorang muslim dan muslimah karena menjadi symbol keislaman. Kalau seseorang belum dikhitan berarti belum sempurna keislamannya.⁴²

⁴²Musdah Mulia , Mengupas Seksualitas...162

Akan tetapi, sangat berbeda dengan laki-laki, khitan perempuan justru dapat menimbulkan masalah kesehatan pada perempuan. Sebab, segala jenis operasi pada organ genital perempuan akan menyebabkan timbulnya gangguan fisik dan psikis yang serius pada perempuan. Gangguan fisik dan psikis ini bias terjadi dalam waktu jangka pendek, atau dalam waktu jangka panjang. Konsekuensi logis dari pada khitan perempuan tanpa arahan atau tanpa SOP akan mengakibatkan pendarahan bahkan kematian, fenomena tersebut menjadi tekanan psikologis bagi si anak tersebut.

Secara fisik, dampak langsung khitan perempuan juga akan menimbulkan rasa sakit, pendarahan, shock, tertahannya urin, serta luka pada jaringan sekitar vagina. Pendarahan dan infeksi ini pada kasus tertentu akan berakibat fatal pula, bahkan membawa resiko pada

[illegible]

**DASAR PERTIMBANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 *Jo* PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 1636/PER/XII/2010 TENTANG KHITAN
PEREMPUAN**

Khitan perempuan merupakan sebuah implementasi pemikiran yang salah yang tersebar di tengah-tengah pemeluk agama lain. Terdapat kepercayaan bahwa dengan membuang bagian-bagian tertentu dari organ kelamin luar seorang gadis hasrat seksualnya dapat dikurangi. Namun berbeda dengan kepercayaan yang dipegang teguh oleh dukun-dukun yang akan mengkhitan perempuan, para dukun memiliki kepercayaan bahwa khitan yang efektif adalah memerlukan potongan yang dalam dengan sebuah silet untuk menjamin pemotongan klitoris menjadi sempurna. Hal ini mengakibatkan banyaknya pendarahan yang bahkan terkadang dapat menyebabkan kematian.¹

Khitan perempuan di Indonesia pernah dilarang oleh pemerintah melalui surat edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia tanggal 20 April tahun 2006 tentang larangan medikalisasi khitan perempuan bagi petugas kesehatan yang menyatakan tenaga medis tidak boleh membantu praktik tersebut sebagai upaya

47

¹Izinkan Sunat perempuan, Menkes dikecam <https://nasional.tempo.co/read/455982/izinkan-sunat-perempuan-menkes-dikecam>.

- b. MUI menganjurkan kepada Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Penetapan fatwa tentang khitan perempuan berdasarkan pada ketentuan ayat tentang perintah mengikuti ajaran nabi Ibrahim sebagaimana terdapat dalam:

- QS. An-Nahl:123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): ‘ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif’ dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersatukan Tuhan. (Q.S. An-Nahl: 123)

- QS. An-Nisa: 125

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Dan siapkan yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. (Q.S. An-Nisa: 125).

Untuk menghindari adanya bahaya akibat penyimpangan terhadap praktek khitan perempuan, maka dalam fatwa MUI menegaskan batasan-batasan atau tata cara khitan perempuan yang sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana yang terdapat dalam fatwa tersebut. Penentuan batasan atau tata cara khitan perempuan tersebut lebih menekankan pada 3 prinsip berdasarkan petunjuk yang diberikan Nabi saw, yaitu: ⁴

- a. Sedikit saja

⁴Konsideran Fatwa MUI- DIY No.9A Tahun 2008.

menetapkan masalah khitan perempuan. Realisasi MUI tersebut salah satunya PERMENKES Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan.⁵

Alasan dikeluarkannya permenkes tersebut karena praktek khitan perempuan tidak dapat dihapuskan karena agama dan tradisi. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari bagian awal penjelasan permenkes yaitu: “bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada perempuan, pelaksanaan khitan perempuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standart pelayanan, standart profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang dikhitan”.⁶

Kebijakan ini diambil karena mengingat khitan wanita masih di praktikkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Apabila wanita dilarang dilakukan oleh tenaga kesehatan, di khawatirkan khitan masyarakat yang ingin mengkhitan bayi perempuan akan pergi ke dukun, dan hal tersebut justru akan menimbulkan berbagai komplikasi.⁷

Adapun beberapa point yang diatur dalam Permenkes Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan yaitu:⁸

Pasal 1 ayat 1

Sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.

⁵Asrorun Ni'am Sholeh, "*konteksi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Pulitbang Lektur dan Khazanah, 2012), 6-7.

⁶Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.

⁷ Ilman Hadi, *Sunat Perempuan*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5004324178331/sunat--perempuan/>. Diakses Tanggal 15 Juni 2019, jam 19.19.

⁸Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang *Khitan* Perempuan.

Menurut WHO, khitan perempuan termasuk bentuk penyiksaan, sehingga dimasukkan dalam salah satu bentuk kekerasan pada perempuan, walaupun dilakukan oleh tenaga medis. Berbagai pihak juga menganggap bahwa khitan perempuan bertentangan dengan hak asasi manusia terkait dengan tidak adanya kekerasan pada perempuan berkaitan dengan penderitaan serta dampak yang timbul.

[illegible]

Masalah khitan perempuan ini banyak dibahas oleh hampir seluruh lembaga ataupun organisasi, terutama dalam lembaga kesehatan. Dalam upaya memberikan perlindungan pada perempuan, terutama dalam hal khitan. Menteri kesehatan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang sunat perempuan yang tertuang dalam PMK Nomor 1636/2010.

Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa khitan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis tertentu yang dapat memberikan pelayanan khitan pada perempuan seperti dokter, bidan, dan perawat yang mempunyai surat izin praktek. Menteri kesehatan juga mencantumkan syarat-syarat dalam pelaksanaan khitan perempuan seperti: dilakukan diruangan dan tempat tidur atau meja tindakan yang bersih, menggunakan alat-alat yang steril, mendapat pencahayaan yang cukup, dan juga menggunakan air bersih yang mengalir.¹¹

Maksud dari khitan perempuan dalam permenkes tersebut yaitu tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris. Hal ini berarti sama sekali berbeda dengan yang dimaksud dalam

¹¹Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 672, PMK Nomor 1636 Tahun 2010. tentang khitan perempuan, Bab II, Pasal 2 Ayat (1), Tertanggal 15 November 2010.

1. Khitan perempuan tidak dapat dilakukan pada perempuan yang sedang menderita infeksi genitalia eksterna atau infeksi umum.
2. Khitan perempuan dilarang dilakukan dengan cara:
 - a. Mengkauterisasi klitoris.
 - b. Memotong atau merusak klitoris baik sebagian maupun seluruhnya.
 - c. Memotong atau merusak labia minora, labia majora, hymen atau selaput darah dan vagina baik sebagian atau seluruhnya.

Adapun keberlakuan peraturan ini hanya berlangsung kurang lebih selama 4 tahun. Karena kemudin peraturan ini di cabut dengan di berlakukannya PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* PMK Nomor 1636 Tahun 2010 tentang khitan perempuan. Selanjutnya terdapat beberapa kelompok aktivis perempuan yang mendukung keberlakuan PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Menurut kelompok aktivis perempuan PMK

¹³Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 672, PMK Nomor 1636 Tahun 2010. tentang khitan perempuan, Bab II, Pasal 2 Ayat (1), Tertanggal 15 November 2010.

Adapun beberapa poin yang diatur dalam PERMENKES nomor 6 tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan sebagai berikut:¹⁵

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2010 tentang sunat perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Memberi mandate kepada majelis pertimbangan kesehatan dan syara' ketentuan untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan kesehatan perempuan yang di sunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (Female Genital Mutilation).¹⁶

Wakil Menteri Kesehatan, Ali Qufron Mukti menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 telah mencabut peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 yang mengatur tentang praktik khitan perempuan. Qufron mengatakan pencabutan itu dikarenakan banyak pemikiran masyarakat yang menganggap khitan perempuan di Indonesia adalah sama dengan khitan perempuan yang dilakukan di Afrika, yaitu dengan memutilasi

¹⁶Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 185, PERMENKES Nomor 6 tahun 2014 tentang pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan, Menimbang Huruf (b), Tertanggal 7 februari 2014

kelamin perempuan (female genital mutilation). Di Indonesia, khitan perempuan dilakukan dengan cara menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris dengan menggunakan jarum steril tanpa melukainya.¹⁷

Pemikiran-pemikiran masyarakat yang dimaksud dalam ungkapan wakil menteri kesehatan tersebut tidak jauh berbeda dengan istilah yang diberikan WHO tentang khitan perempuan yaitu *Female Genital Cutting* (FGC) atau *Female Genital Mutilation* (FGM) atau mutilasi alat kelamin perempuan. Menurut WHO, definisi FGM yaitu meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genitalia eksterna atau melukai pada organ kelamin perempuan karena alasan non medis.¹⁸

Dalam wawancaranya Nafsiah Mboiy selaku menteri kesehatan menampik pihaknya melarang khitan perempuan seperti yang berkembang saat ini. Peraturan menteri kesehatan justru mengizinkan perempuan di khitan, asalkan memenuhi syarat kesehatan. Nafsiah menyatakan bahwa beberapa penelitian khitan di Indonesia tidak benar-benar memotong kelamin. Lebih banyak simbolis, ada yang diletakkan di pisau atau yang Cuma menggores, nafsiah juga menjelaskan bahwa khitan perempuan sangat rentan terutama bila dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman. Tentang peraturan Menteri soal khitan perempuan, Nafsiah menjelaskan bahwa tadinya menteri kesehatan tidak ingin adanya praktik khitan perempuan, seperti yang tercantum dalam keputusan tahun 2006. Akan tetapi Majelis

¹⁷ Larangan Khitan Perempuan <https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicabut/1839905.html>. diakses pada tanggal 20 Juni 2019

¹⁸Adika Mianoki, *Polemik Khitan Wanita* <http://muslim.or.id/11314-polemik-khitan-wanita.html>. Diakses pada tanggal 20 juni 2019.

Ulama Indonesia (MUI) tidak setuju adanya pelarangan sama sekali terhadap khitan perempuan.¹⁹

Ketua sub- komisi pemantauan Komnas Anti Kekerasan, Arimbie Heroepati, mengatakan khitan yang dilakukan berdasarkan tradisi ini dilakukan karena stigma terhadap perempuan. Jangankan menyayat, langkah simbolis pun berangkat dari pandangan yang merupakan stigma terhadap perempuan, bahwa perempuan tidak bersih dan perlu disunat atau untuk mengelola libido yang besar sehingga perlu dikhitan. Lebih lagi, khitan dilakukan pada anak perempuan di bawah umur yang belum punya suara terhadap badannya sendiri. Sehingga sunat dalam bentuk simbol pun kami anggap kekerasan.²⁰

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan khitan perempuan atau female genital mutilation (FGM) adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Khitan perempuan tidak memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan bahkan bisa menyebabkan infeksi, gangguan kencing, hingga komplikasi ketika melahirkan.²¹

Dari pandangan medis, khitan perempuan tidak ada manfaatnya bagi perempuan, bahkan faktanya dapat menimbulkan kematian, walaupun petugas medis yang melakukannya. Namun dalam kurikulum kedokteran

¹⁹Indonesia tolak pemotongan kelamin perempuan,
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/11/121126_sunat_perempuan, diakses
pada tanggal 20 Juni 2019.

²⁰Komnas Kecam sunat perempuan
https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/02/130204_komnassunat. diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

²¹Female Genital Mutilation <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>. diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014, yang terbaru dikeluarkan ini, oleh sebagian gerakan masyarakat sipil dianggap ambigu

[illegible]

karena menyatakan melarang, tetapi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan praktik khitan perempuan.²³

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sebagian besar dari narasumber dengan berbagai kategori (ibu, dukun, tokoh agama, pendidik, dan tokoh adat) tidak mengetahui mengenai Permenkes Nomor 6 Tahun 2014. Para bidan di 10 provinsi wilayah memiliki pengetahuan yang beragam mengenai Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tersebut sebagian mengetahui dan sebagian lainnya tidak mengetahui. Bahkan bidan yang tidak mengetahui peraturan tersebut masih memberlakukan peraturan menteri kesehatan tahun 2010. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya mengenai sosialisasi dari Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 itu sendiri setelah beberapa tahun dikeluarkan. Dengan masih ditemukannya khitan perempuan hingga saat ini di beberapa wilayah menunjukkan bahwa implementasi dari Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tidak berjalan sebagaimana mestinya.²⁴

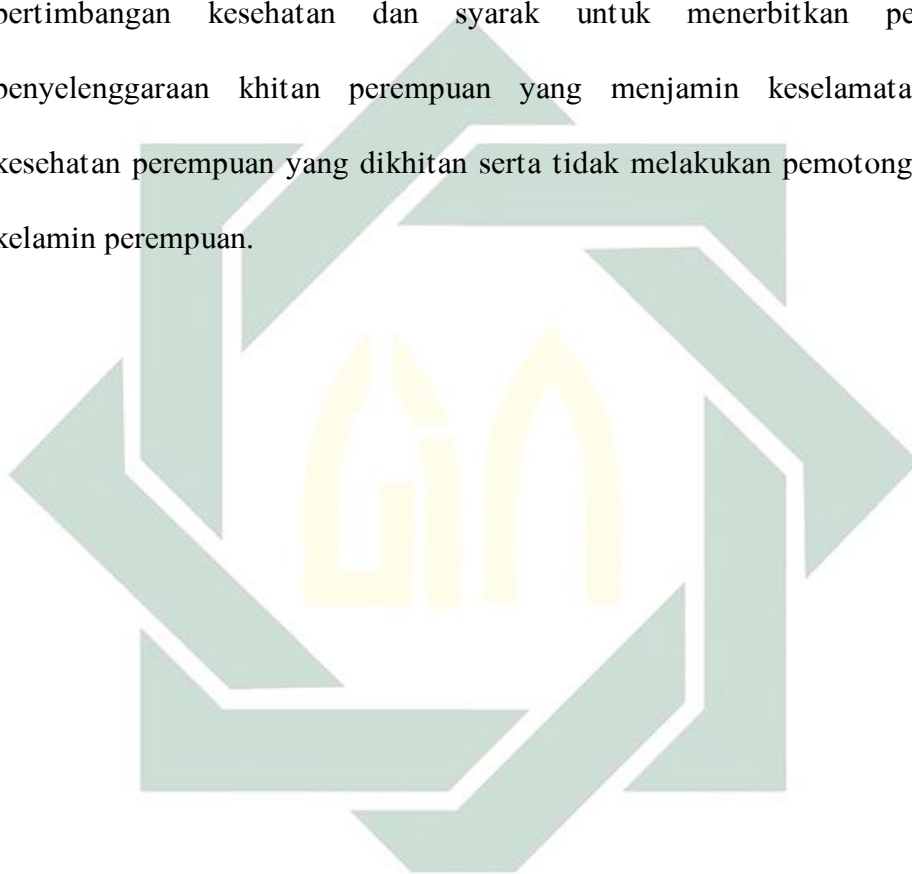
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa alasan menteri kesehatan mengeluarkan peraturan yang berisi pencabutan terhadap PMK Nomor 1636 Tahun 2010 adalah peraturan ini tindakan melakukan khitan perempuan bagi tenaga kesehatan justru ditegaskan atas jaminan keamanan dan keselamatan perempuan yang di khitan. Peraturan ini sama sekali tidak

²³Siti Nurwati Khodijah, *Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas* https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2019/Hasil%20Kajian%20Kualitatif%20Pemotongan-Pelukaan%20Genitalia%20Perempuan%20di%2010%20Propinsi-%2017%20Kabupaten-Kota.pdf. 62 diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

²⁴ Siti Nurwati Khodijah *Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas*
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2019/Hasil%20Kajian%20Kualitatif%20Pemotongan-Pelukaan%20Genitalia%20Perempuan%20di%2010%20Propinsi-%202017%20Kabupaten-Kota.pdf. 75 diakses pada tanggal 28 Juni 2019 .

Adapun landasan terbitnya PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 adalah karena praktek khitan perempuan dinilai melanggar hak reproduksi dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk menyehatkan perempuan dan tidak ada manfaatnya dari segi medis, kemudian banyaknya perdebatan yang terjadi di organisasi sipil yang sudah dipaparkan diatas serta desakan dari UNICEF dan who terkait penghapusan praktik khitan

²⁶ Siti Nurwati Khodijah *Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas*
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2019/Hasil%20Kajian%20Kualitatif%20Pemotongan-Pelukaan%20Genitalia%20Perempuan%20di%2010%20Propinsi-%2017%20Kabupaten-Kota.pdf. 76, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.



peraturan tentang khitan perempuan Nomor 1636/PER/XI/2010. Melalui peraturan ini tindakan melakukan khitan perempuan bagi tenaga kesehatan justru ditegaskan atas jaminan kesehatan dan keamanan perempuan yang di khitan.

Kemudian setelah 4 tahun berlalu terjadi perdebatan di organisasi sipil yang melarang khitan perempuan seperti wakil menteri kesehatan, aktivis perempuan, Ketua sub- komisi pemantauan Komnas Anti Kekerasan, Pengurus Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, dan WHO serta adanya desakan dari UNICEF, maka kementerian kesehatan mengeluarkan peraturan menteri kesehatan nomor 6 tahun 2014 yang mencabut peraturan tentang khitan perempuan nomor 1636/PER/XI/2010.

Perbedaan peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XI/2010 dengan peraturan menteri kesehatan kesehatan Nomor 6 tahun 2014 yaitu pada tahun 2010, peraturan tersebut sama sekali tidak menegaskan pelarangan atas pelukaan genital perempuan dan malah menjadi petunjuk pelaksanaan bagi petugas kesehatan untuk melakukan pelukaan genital perempuan. Sedangkan peraturan pada tahun 2014 memberi mandat kepada majelis pertimbangan kesehatan dan syarak untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan khitan perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang dikhitan serta tidak melakukan pemotongan alat kelamin perempuan. ketetapan atau peraturan tersebut dimana tidak ada larangan total yang ada hanya himbuan pedoman pelaksanaan khitan perempuan yang diawasi sedemikian rupa, agar tidak melanggar kesehatan.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Guna mencegah terjadinya suatu hal yang tidak di inginkan, maka MUI telah mendapatkan batasan-batasan atau tata cara mengkhitan seorang perempuan yaitu dengan 3 hal: 1) sedikit saja, 2) tidak berlebihan, 3) tidak menimbulkan bahaya. Seperti yang ditetapkan oleh mazhab maliki, hanafi dan hanabilah yang berdasarkan hadis.

Bahwasanya seorang perempuan mengkhitankan dimadinah maka nabi saw, berkata kepadanya, ‘jangan engkau merusak (kelaminnya), karna hal itu merupakan kehormatan bagi perempuan. (H.R. Abu Dhawud yang bersumber dari Ummi Athiyyah).

[illegible]

Dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan, peraturan tersebut termasuk dalam *Saad Al-Dhari'ah* karena dicegah tapi tidak sepenuhnya ditutup. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 yang menjelaskan cara mengkhitan perempuan yang baik dan benar dan pelaksanaan khitan perempuan hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis. Setelah 4 tahun berlalu peraturan tersebut dicabut dan Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan Nomor 6 tahun 2014. Landasan terbitnya peraturan tersebut karena praktek khitan perempuan dinilai melanggar hak reproduksi dan tidak ada manfaatnya bagi kesehatan.

Di Indonesia praktik khitan merupakan tradisi dan agama. Alasan khitan perempuan masih berlaku di masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa khitan perempuan untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan, masyarakat meyakini bahwa khitan membuat gairah perempuan dapat dikontrol. Menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan tubuh perempuan.

WHO menjelaskan beberapa informasi tentang FGM. Menurut mereka, FGM meliputi suatu proses yang mengubah atau menyebabkan

Ditinjau dari jenis kemafsadatan *Saad Al-Dhari'ah* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014, peraturan ini pada dasarnya peraturan yang mencegah adanya praktik khitan perempuan tapi tidak sepenuhnya ditutup. Peraturan tersebut adalah peraturan yang menganjurkan tentang larangan praktik khitan perempuan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram baik di sengaja atau tidak. Hal diatas dikuatkan dengan unsur *Saad Al-Dhari'ah* dengan *ifda'* yang berarti dugaan kuat akan terjadinya sesuatu (dugaan kuat akan terjadinya kemafsadatan)

[illegible]

Sedangkan menurut pandangan medis, khitan perempuan tidak ada manfaatnya bagi perempuan, bahkan faktanya dapat menimbulkan kematian, walaupun petugas medis yang melakukannya. Namun dalam kurikulum kedokteran maupun kebidanan tidak pernah diajarkan tentang praktik khitan perempuan. Kemudian menurut WHO secara konsisten dan jelas menyampaikan bahwa FGM membahayakan dan tidak berguna bagi perempuan.

Dengan demikian, jika menggunakan metode hukum *Saad Al-Dhari'ah* dalam peraturan tersebut sudah benar, karena dengan dicegahnya pelaksanaan khitan perempuan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perempuan. Oleh sebab itu DEPKES mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 karena menimbulkan ke mudharatan bagi perempuan apabila melakukan khitan perempuan dan tidak ada manfaatnya bagi kesehatan.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa macam-macam *Saad Al-Dhari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya, yaitu perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan karena jarang atau kecil kemungkinan

71

1. Alquran surah Al-Baqarah,2:104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakana (kepada Muhammad) : “Raa’ina”, tetapi katakanlah “Unzhurna”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. Al Baqarah (2): 104).¹⁰²

2. Kaidah fikih

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (masalahah).

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara analisis *Saad Al-Dhari'ah* penulis lebih setuju jika peraturan nomor 6 tahun 2014 yang mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tahun 2010 tentang khitan perempuan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Saad Al-Dhari'ah* yang pada intinya, salah satu metode penggalian hukum yang bersifat mencegah sesuatu agar kedepannya tidak menimbulkan kemafsadatan. Kemafsadatan yang akan muncul jika diberlakukannya khitan perempuan akan menimbulkan dampak negatif bagi perempuan baik dari medis maupun psikologis. Akan tetapi peraturan tersebut dicegah atau melarang adanya praktik khitan perempuan tapi tidak sepenuhnya tertutup, karena masih ada peluang dari masyarakat untuk melakukan khitan perempuan.

¹⁰² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 16.

Hal ini sesuai dengan prinsip *Saad Al-Dhari'ah* yang pada intinya, salah satu metode penggalian hukum yang bersifat mencegah sesuatu agar kedepannya tidak timbul kemafsadatan. Dalam sudut pandang keduanya (diterima dan ditolak) mempunyai kemafsadatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan analisis terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII//2010 Tentang Khitan Perempuan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan pencabutan peraturan sebelumnya kemudian peraturan menteri kesehatan mengeluarkan peraturan baru Nomor 6 tahun 2014 yaitu bahwa peraturan sebelumnya tindakan tentang khitan perempuan lebih kepada membahayakan dan membuka peluang untuk orang-orang membuka praktik ilegal, maka dari itu PERMENKES lebih menegaskan pada peraturan baru dimana peraturan tersebut mempertegas untuk tidak melakukan pelukaan genital pada perempuan atau anak perempuan yang mau di khitan.
2. Sesuai dengan analisis *Saad Al-Dhari'ah* ada mafsadah yang akan ditimbulkan. Peraturan Nomor 6 tahun 2014 yang mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tahun 2010 tentang khitan perempuan sudah sesuai dengan prinsip *Sadd Al- Dhari'ah*, karena sudah menutup kemungkinan resiko ke mudharatan praktik khitan perempuan yang membahayakan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Kementerian Kesehatan penting untuk memastikan sosialisasi Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 1636 tentang khitan Perempuan hingga Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota serta melibatkan Ikatan Bidan setempat. Kementerian Kesehatan penting mengembangkan SOP dan Petunjuk Pelaksana Larangan Medikalisasi khitan perempuan kepada masyarakat secara bertahap, seperti program nasional AKI serta pengembangan strategi ke mitraan antara tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan (dalam hal ini dukun) untuk menghentikan praktik khitan perempuan dan melakukan sosialisasi menyeluruh terkait Praktik FGM yang tidak bermanfaat secara kesehatan reproduksi dan seksual kepada perempuan.
2. Bagi pembaca analisis sadd al-dzari'ah tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII//2010 Tentang Khitan Perempuan tidak dapat dijadikan tolak ukur mutlak dalam peraturan yang sama karena diperlukan adanya faktor yang mempengaruhi seperti wacana (perantara) dan kemafsadatan yang akan timbul.

- Khodijah, Siti Nurwati. *Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas* https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2019/Hasil%20Kajian%20Kualitatif%20Pemotongan-Pelukaan%20Genitalia%20Perempuan%20di%2010%20Propinsi-%2017%20Kabupaten-Kota.pdf.75 diakses pada tanggal 28 Juni 2019
- Klarung, Auf. “*Khitan Bagi Perempuan Ditinjau dari Kesehatan dan Islam*”, http://www.kompasiana.com/aufklarung/khitan-bagi-perempuan-ditinjau-dari-kesehatan-dan-islam_552b74786ea834c7538b45b2, diakses tanggal 07 Juni 2019
- Konsideran Fatwa MUI- DIY No.9A Tahun 2008
- Larangan Khitan Perempuan <https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicabut/1839905.html>
- Lutfi Ahmad Fathullah. 2006. *Fiqh Khitan Perempuan*. Jakarta: al-Mughni dan Mitra Inti.
- Mahjuddin. 2012. *Masa'il Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mamik, Syafa'ah. 2016. *Khitan Wanita dan Prostitusi*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Mas'ud Ibnu, Abidin Zainal. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*. Bandung:Pustaka Setia.
- Mas'ud, Ibnu . 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Muamalat, Munakahat, Jinayat), Buku 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mianoki,Adika. *Polemik Khitan Wanita* <http://muslim.or.id/11314-polemik-khitan-wanita.html>. Diakses pada tanggal 22 juni 2019
- Muhammad Husen. 2007. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.
- Muhammad, Husein . 2007. *Fikih perempuan*. Yokyakarta.
- Mulia, Musdah . 2015.Mengupas Seksualitas. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Naily, Nabiela. 2009. *Sunat Perempuan di Suku Using Antara Tradisi Kesehatan dan Gender*. Surabaya.
- Nawawi, Imam . t.t. *Syarh Shahih Muslim, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikt.

- Pasek Made, Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Peraturan Menkes RI, No.1636, Tahun 2010 Bab I, pasal I, Peraturan Menteri Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 *Tentang Khitan Perempuan*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 *Tentang Khitan Perempuan*.
- Romli. 2017. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: PT Karisma Putra Utama.
- Sarapung, Elga dkk. 1999. *Agama dan Kesehatan Reproduksi* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sarwono, Jonathan. 2010. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: ANDI.
- Setyaningrum. 2017. *Praktek Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Jengglong Waru Kebakkramak Karanganyar)*. Skripsi -- IAIN Surakarta.
- Shalabi, Ahmad. 2001. *Kehidupan Sosial dan Pemikiran Islam*. Jakarta: Amzah.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2012. “ *konteksi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Pulitbang Lektur dan Khazanah.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*.
- Soekamto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Uneversitas Indonesia.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. 2009. *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*. Yogyakarta: Teras.
- Syafe'I, Rahmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syaraf, Musa Shalih. 1999. *Problematisasi Wanita*, Terj. Iltizam Syamsuddin. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syarif Ahmad, Nisa Abdahilla. *Fiqh Wanita*. Solo: Anggota SPI. 2012
- Syukur, Abdul al-Azizi. 2017. *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*. Depok: PT. Hutaparhapuran.

